



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. www.pta-surabaya.go.id, ptasurabaya@gmail.com

Nomor : 3532/KPTA.W13-A/HM1.1/VII/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas 2025

Surabaya, 21 Juli 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama
se Jawa Timur

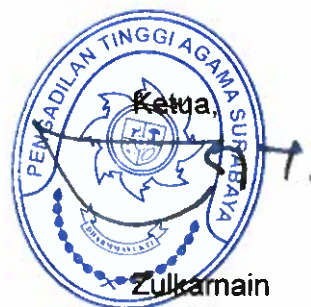
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1611/DJA/HM.1.1/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas 2025 dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program prioritas satuan kerja pada lingkungan peradilan agama sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 025/DJA/SK.OT1/II/2025 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2025, maka dengan ini diperintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Prioritas periode bulan Januari s.d. Juni 2025/ Semester 1 (satu) sebagaimana terlampir pada format laporan;
2. Mengirimkan laporan hasil monitoring dan evaluasi tersebut melalui [link https://bit.ly/Monev_Program_Prioritas_2025](https://bit.ly/Monev_Program_Prioritas_2025) paling lambat hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA

| No. | Nama Program Prioritas | Kegiatan | Uraian Kegiatan | |
|-----|-------------------------|---|---|--------------------|
| | | | Capaian | Keterangan/ Eviden |
| 1 | Penguatan Integritas | 1. Pembangunan Zona Integritas | a. Tidak ada lagi pengaduan aparaturnya pengadilan | |
| | | | b. Pendampingan satuan kerja yang diusulkan WBK dan WBBM | |
| | | | c. 50% satuan kerja diusulkan WBK berhasil meraih penghargaan | |
| | | | d. 20% satuan kerja diusulkan WBBM berhasil meraih penghargaan | |
| | | | e. Penguatan fungsi dan peran role model serta Agen Perubahan di satuan kerja masing-masing | |
| | | | f. Penyampaian LHKPN serta laporan SPT 100% | |
| | | 2. Pembangunan Manajemen Anti Penyuapan | a. 100% terbentuknya sistem manajemen anti penyuapan pada seluruh satuan kerja | |
| | | | b. Tidak ada praktik pungli dan gratifikasi dalam bentuk apapun | |
| | | | c. Pendampingan kepada satuan kerja yang diusulkan SMAP | |
| | | 3. Optimalisasi e-Binwas dan e-TR | a. Kepatuhan 100% dan pengawasan melalui e-Binwas | |
| | | | b. Kepatuhan 100% menilai Hakim melalui e-TR | |
| | | | c. Ditjen Badilag mengembangkan aplikasi e-TR untuk seluruh aparaturnya pengadilan agama | |
| 2 | Penguatan Akuntabilitas | 1. Penguatan Kinerja Akuntabilitas | a. Satuan kerja mendapatkan nilai SAKIP kategori Memuaskan (A) dan Sangat Baik (BB) | |
| | | | b. Terdapat 5 PTA yang mendapatkan AKIP kategori Memuaskan (A) | |
| | | | c. Badilag berupaya mendorong satuan kerja meraih penghargaan dari berbagai lembaga eksternal | |
| | | | | |

| No. | Nama Program Prioritas | Kegiatan | Uraian Kegiatan | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| | | | Capaian | Keterangan/ Eviden |
| | | 2. Keterbukaan Informasi Publik | a. Tersedianya kemudahan akses informasi publik melalui sosial media pada masing-masing satuan kerja b. Tersedianya PTSP <i>online</i> pada setiap satuan kerja | |
| 3 | Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan | 1. Implementasi e-Court | a. Satuan kerja dapat mengoptimalkan layanan PTSP <i>online</i> dan pojok e-Court dengan menunjuk petugas khusus yang menangani layanan tersebut | |
| | | | b. Penggunaan e-Court mencapai 80% untuk seluruh satuan kerja | |
| | | 2. Optimalisasi keberhasilan mediasi | a. Tersajinya Pedoman dan Tata kelola Mediasi, Khususnya terkait rekrutmen Mediator Non Hakim, Pola evaluasi, dan penghargaan yang belum diatur dalam SK KMA Nomor 108/KM/SK/VI/2016 | |
| | | | b. Penyelesaian perkara melalui mediasi mencapai 40% dari total perkara yang dimediasi | |
| | | 3. Peningkatan Keberhasilan Eksekusi | a. Satuan kerja dapat bersinergi dengan pihak eksternal, seperti aparat keamanan dan <i>stakeholders</i> terkait penyelesaian perkara eksekusi | |
| | | | b. Penyelesaian permohonan eksekusi putusan mencapai 50% total permohonan eksekusi | |
| | | 4. Penyelesaian perkara tepat waktu | Satuan kerja ditargetkan dapat menyelesaikan perkara 100% dari total perkara diajukan | |
| | | | | |
| 4 | Penguatan Kelembagaan | 1. Kerjasama dalam dan luar negeri | a. Satuan kerja melakukan kerjasama dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak, seperti kerja sama dengan pemerintah daerah, perusahaan milik negara (BUMN), perusahaan milik daerah (BUMD), dan pihak swasta | |
| | | | b. Satuan kerja melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin | |
| | | | c. Satuan kerja melakukan kerjasama dengan DPPA/ DP3AP2KB/ PUSPAGA terkait <i>assessment</i> anak dalam perkara dispensasi kawin | |

| No. | Nama Program Prioritas | Kegiatan | Uraian Kegiatan | |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| | | | Capaian | Keterangan/ Eviden |
| | | | d. Melakukan kerja sama lainnya yang menunjang pelayanan peradilan | |
| | | | e. Badilag melakukan kerjasama dengan dunia kampus dan penyelenggaraan program Badilag Goes to Campus | |
| | | | f. Badilag melakukan kerjasama internasional untuk saling menukar informasi (<i>share knowledge</i>), mengadopsi praktik terbaik (<i>best practices</i>) dari negara lain untuk memperbaiki sistem peradilan agama di Indonesia, serta terkait pelatihan teknis yudisial | |
| | | 2. Peningkatan kelas Pengadilan | | |
| | | | a. Terdapat 20 pengadilan yang dapat diusulkan untuk meningkat kelasnya, dengan masing-masing 10 pengadilan kelas II diusulkan untuk meningkat menjadi pengadilan kelas IB dan 10 pengadilan IB yang diusulkan meningkat menjadi pengadilan kelas IA | |
| | | | b. Pengusulan diutamakan terhadap satuan kerja yang berada di wilayah ibu kota provinsi | |
| | | 3. Pembentukan Pengadilan Agama baru | Terdapat 10 satuan kerja baru yang dapat diusulkan | |
| 5 | Penguatan Sumber Daya Manusia | 1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis | a. Terselenggaranya pelaksanaan <i>workshop leadership</i> bagi pimpinan pengadilan dengan frekuensi penyelenggaraan minimal 4 kali dalam setahun | |
| | | | b. Tercapainya peningkatan kualitas putusan dan penetapan pengadilan | |
| | | | c. Tercapainya peningkatan profesionalisme aparatur pengadilan agama melalui pengembangan keterampilan teknis dan <i>soft skills</i> | |
| | | | d. Tercapainya peningkatan pemahaman terhadap teknologi informasi dan bahasa asing | |

| No. | Nama Program Prioritas | Kegiatan | Uraian Kegiatan | |
|-----|-------------------------------|--|--|--------------------|
| | | | Capaian | Keterangan/ Eviden |
| | | 2. Rekrutmen Pimpinan berdasarkan <i>Merit System</i> | a. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas proses seleksi pimpinan | |
| | | | b. Tercapainya peningkatan kinerja pengadilan | |
| | | | c. Terwujudnya peradilan yang adil dan profesionalisme | |
| | | 3. Optimalisasi Penilaian Kinerja Individu | a. Satuan kerja dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk monitoring dan evaluasi | |
| | | | b. Satuan kerja menyusun laporan kinerja secara periodik dan terbuka | |
| | | | c. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi Mediator secara berkala | |
| | | | d. Tersedianya kriteria penilaian yang jelas terukur dan objektif | |
| | | 4. <i>Reward and Punishment</i> | a. Adanya program <i>Badilag Award</i> | |
| | | | b. Penghargaan bagi Mediator berprestasi, baik hakim maupun non hakim | |
| | | | c. Penghargaan bagi satuan kerja yang menerapkan <i>e-Court</i> 100% | |
| 6 | Penguatan Teknologi Informasi | 1. Penyederhanaan dan integrasi inovasi berbasis teknologi informasi | a. Pembuatan <i>Badilag Super-App</i> b. Proses integrasi 3000 lebih aplikasi pada satuan kerja se Indonesia | |
| | | 2. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik | a. Pemenuhan infratraktur digital pengadilan agama seluruh Indonesia b. Pengembangan data <i>center</i> <i>Badilag</i> c. Peningkatan sistem keamanan data d. Peningkatan kualitas validitas data e. Penguatan kompetensi digital bagi hakim dan aparatuer peradilan agama | |

| No. | Nama Program Prioritas | Kegiatan | Uraian Kegiatan | |
|-----|------------------------|--|---|--------------------|
| | | | Capaian | Keterangan/ Eviden |
| | | | f. Pemanfaatan <i>Internet of Things</i> (IoT) pada aplikasi Access CCTV Online | |
| | | | g. Pengembangan aplikasi gugatan mandiri menggunakan pemrograman Neurolinguistik (NLP) dan K-Nearest Neighbor (KNN) | |
| | | | h. Pemanfaatan AI dalam pengolahan data pada aplikasi KINSATKER, e-TR, SIMTEPA, dan e-Binwas secara integral | |
| | | 3. Membentuk Tim Nasional Teknologi dan Informasi (TNTI) | | |
| | | | a. Tersedianya pedoman kriteria Tim Nasional Teknologi Dan Informasi | |
| | | | b. Melakukan sosialisasi pembentukan Tim Nasional Teknologi Dan Informasi | |
| | | | c. Melaksanakan seleksi Tim Nasional Teknologi Dan Informasi | |
| | | | d. Terbentuknya Tim Nasional Teknologi dan informasi | |

..... Juli 2025
Ketua Pengadilan Agama

.....